

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu bentuk pembangunan manusia secara utuh dan terorganisir mulai dari bentuk *learning to know* (mengetahui), *learning to do* (melakukan), and *learning to get* (mendapatkan). Pendidikan di setiap negara memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda tergantung pada kebutuhan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Pendidikan Indonesia telah mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang cukup panjang. Di Indonesia saat ini, pendidikan telah difokuskan pada aspek pemerataan dan tentunya berpengaruh terhadap kalangan pendidik maupun peserta didik. Tidak terlepas dari aspek pemerataan tersebut, dunia pendidikan Indonesia juga mencakup aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum.

Indonesia merupakan sebuah bangsa yang sedang giat-giatnya dalam pencapaian tujuan nasionalnya. Pendidikan merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Seperti yang terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin Oleh

Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dari alinea keempat UUD 1945 ada 4 (empat) tujuan nasional Indonesia di dalamnya yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mencerdaskan kehidupan bangsa disini maksudnya pemerintah Indonesia harus fokus terhadap dunia pendidikan, karena pada dasarnya pendidikan merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Disamping itu, pendidikan yang bermutu pastinya akan memberikan dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya berdasarkan fungsi pendidikan nasional yang dituangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dunia pendidikan memiliki cabang ilmu pengetahuan yang luas. Seperti dijelaskan sebelumnya mencakup berbagai aspek yang meliputi: aspek sosial budaya, politik, ekonomi, dan hukum. Berbicara mengenai pengaruh aspek politik dalam dunia pendidikan sebenarnya menyinggung bagaimana pelaksanaan pendidikan politik secara umum yang telah diberikan oleh sekolah. Fungsi pendidikan politik di sekolah diharapkan bisa memberi pengetahuan melek politik ataupun kesadaran politik terhadap siswa. Sehingga dalam memberikan pengetahuan tentang melek politik, peran guru, mata pelajaran, serta sekolah sangat berpengaruh dalam hal ini.

Umumnya saat menjelang Pemilu (pemilihan umum), hampir di setiap sekolah dilakukan sebuah bentuk sosialisasi tentang pemilihan umum. Sosialisasi pemilu idealnya dilakukan oleh anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum). Walaupun telah ada peraturan yang menyatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan politik praktis di lingkungan sekolah, akan tetapi terkadang masih ada kader-kader partai tertentu mengambil andil dalam kegiatan politik praktis tersebut. Dalam dunia pendidikan khususnya di lingkungan sekolah harus dibedakan antara pendidikan politik dan kegiatan politik praktis. Karena antara kedua hal ini sangat berbeda tujuannya dalam cakupan dunia pendidikan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di sekolah SMK TI Swasta Budi Agung Medan, dalam kegiatan penyampaian aspirasi politik siswa masih banyak ditemukan berbagai masalah maupun hambatan. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, masih banyak ditemukan bentuk-bentuk ketidaksesuaian fungsi pendidikan politik di sekolah terhadap siswa. Hal ini terlihat dari berbagai

kegiatan penyampaian aspirasi politik siswa yang masih bersinggungan dengan Golput (golongan putih) maupun sifat pasif terhadap kegiatan partisipatif lainnya. Misalnya dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) yang dilaksanakan setiap setahun sekali masih sering ditemukannya Golput ataupun tindakan tidak memilih siapapun. Disamping itu, pada saat pemilihan umum juga masih banyaknya ditemukan siswa yang menganggap pemilu sebagai perihal yang “bodoh amat”.

Selanjutnya selain Pemilu secara umum dan terkhusus lainnya seperti pemilihan OSIS; Pramuka; serta PMR di sekolah, disamping itu penyampaian aspirasi seperti debat ataupun orasi kebangsaan yang merupakan suatu bentuk partisipasi politik nyata siswa di sekolah belum terealisasi dengan baik. Jika ditinjau dari segi kehidupan sehari-hari siswa di luar lingkungan sekolah, kesadaran politik siswa di masyarakat bisa dilihat dari keikutsertaan siswa dalam kegiatan gotong royong serta mengambil bagian dalam kegiatan politik seperti ikut panitia persiapan kemerdekaan. Semua kegiatan ini sudah merupakan sebuah partisipasi politik dalam runang lingkup sekolah. Namun dalam segi pelaksanaan, masih kurangnya kesadaran siswa untuk berpartisipasi secara aktif.

Sebagai pemilih pemula, siswa/i Indonesia masih belum memaknai secara utuh bagaimana konsep dasar pelaksanaan hak pilih yang dimilikinya. Dan berdasarkan fakta di lapangan, siswa kebanyakan memilih untuk Golput saat pemilu padahal siswa itu sendiri telah memiliki hak untuk memilih. Disamping alasan Golput, ada juga berbagai alasan seperti masih kurangnya pengetahuan tentang politik serta maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang perlu

ditegaskan disini adalah bagaimana sebenarnya proses pembelajaran politik yang telah diterima oleh siswa apakah sudah sesuai dengan konsep ataupun sebaliknya.

Mengingat betapa besarnya pengaruh kesadaran politik terhadap terlaksananya partisipasi politik yang baik dalam mencapai warga masyarakat yang demokratis, maka dalam hal ini sebaiknya diberikan perhatian yang lebih seperti pengetahuan dan bentuk pengaplikasian nyata betapa pentingnya kesadaran politik terhadap siswa sebagai generasi pelurus bangsa. Hal ini difungsikan agar siswa tersebut tidak menyalahgunakan hak dan kewajiban politik yang dimilikinya.

Sebagai dasar pengetahuan untuk lebih memahami bagaimana meningkatkan melek politik ataupun kesadaran politik terhadap siswa, peran orang tua; guru; mata pelajaran; serta lingkungan sangat berdampak penting dalam pencapaian hal tersebut.

Melihat betapa banyaknya mata pelajaran di sekolah, oleh karena itu dibutuhkan suatu mata pelajaran yang lebih berkonsentrasi terhadap pembentukan watak demokratis siswa. Oleh karena itu, mata pelajaran PPKn dalam hal ini adalah satu-satunya mata pelajaran yang membahas tentang politik secara umum.

PPKn dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Disamping itu, mata pelajaran PPKn juga memberikan efek nyata dalam pembentukan peserta didik yang demokratis dan bertanggung jawab.

Seperti mata pelajaran pada umumnya, PPKn memiliki beberapa karakteristik tersendiri dalam proses pembahasan materinya seperti; *civic*

intellegency (pengetahuan), *civic responsibility* (kesadaran akan hak dan kewajiban) dan *civic participation* (kemampuan berpartisipasi).

Berdasarkan beberapa karakteristik di atas, maka diharapkan siswa memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya, memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu berpartisipasi dalam kegiatan berdemokrasi di masyarakat. Mata pelajaran PPKn pada pembahasan politik membahas tentang bagaimana pembinaan siswa agar memiliki pengetahuan tentang melek politik. Dalam hal kajian pelaksanaannya menyangkut tentang bagaimana siswa mengetahui, memahami, mengerti, menyadari, meyakini, serta menegakkan ataupun melaksanakan segala apa yang diperoleh dari pembelajaran tersebut.

PPKn sebagai mata pelajaran yang masih dianggap sebagai *second class* (kelas kedua) dalam paradigma lama, perlu dikembangkan dengan sebuah paradigma baru yang memfokuskan pada revitalisasi visi misi, fungsi dan peranan, serta rekonstruksi atau pembangunan maupun pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran. Sehingga dalam kajian ini lebih difokuskan terhadap peningkatan kualitas sikap demokrasi siswa yang berlandaskan pengetahuan serta pengaplikasian nyata di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia terkadang belum sesuai dengan konsep-konsep nilai luhur yang termuat dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, sehingga keinginan untuk membentuk *good citizen* yang diharapkan belum terealisasi dengan nyata. Disamping itu, proses belajar politik ataupun

pendidikan politik merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan serta berkaitan erat dengan perbuatan nyata.

Dalam hal pencapaian partisipasi politik yang diharapkan, maka dibutuhkan suatu bentuk pembelajaran tentang pendidikan politik yang tentunya akan menumbuhkan kesadaran politik yang diharapkan. Melalui mata pelajaran PPKn, peserta didik dapat dibina dan dipersiapkan menjadi generasi yang mampu berperan aktif di dalam kegiatan masyarakat, termasuk dalam kegiatan politik di masa mendatang yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 tersebut.

1.2. Batasan Masalah

Sebuah penelitian dilakukan karena adanya sebuah masalah. Masalah timbul karena adanya kesenjangan antara kenyataan dengan harapan ataupun antara kesenjangan realitas dengan idealnya. Dalam sebuah penelitian memilih masalah secara lebih kontekstual merupakan hal yang cukup sulit. Seperti menurut Tuckman dalam Sugiyono (2017: 52) yang menyatakan “Setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah, walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian”.

Berangkat dari beberapa pernyataan di atas, untuk memudahkan penelitian maka dibutuhkan sebuah batasan masalah. Batasan masalah merupakan suatu bentuk sentralisasi terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Seperti menurut Arikunto (2006:18) “Pembatasan masalah merupakan sejumlah masalah yang merupakan pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian.

Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan masalah penelitian yang akan diteliti”.

Dalam penelitian ini batasan masalah diperlukan untuk memberikan arah pada pembahasan penelitian, agar lebih jelas pandangan dan pembahasannya masih perlu ada batasan masalah yang akan diteliti yaitu: Pengaruh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap pembinaan kesadaran politik siswa.

1.3. Rumusan Masalah

Sugiyono (2017: 5) menyatakan “Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Jika masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dengan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah”.

Berdasarkan pembatasan masalah sebelumnya, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap pembinaan kesadaran politik siswa?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas apa saja yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Seperti yang dikatakan Supranto (2003:191) “Suatu pekerjaan yang tidak memiliki tujuan merupakan pekerjaan yang sangat sia-sia”. Maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap pembinaan kesadaran politik siswa.

1.5. Manfaat Penelitian

Setelah melaksanakan penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah bisa memberikan kontribusi yang baik dalam dunia pendidikan khususnya terhadap peserta didik untuk lebih memahami dan memaknai konsep sadar politik melalui mata pelajaran PPKn.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan masukan bagi ilmu sosial tentang segala hal yang timbul dari penelitian khususnya.

THE
Character Building
UNIVERSITY